

III

AKSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MPO DALAM MENINGKATKAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

A. Korupsi Dalam Perspektif Himpunan Mahasiswa Islam MPO

“Penyalahgunaan wewenang, jabatan, dengan melakukan praktek tindakan, mengambil atau menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan individu atau kelompok. Dari sudut pandang HMI MPO korupsi itu bisa dilakukan tidak sekedar mengambil sebuah harta ataupun sebuah aset tapi itu bisa dilakukan dalam penyalahgunaan wewenang untuk praktek-praktek nepotisme dan lain sebagainya”.³⁷

Terhadap persoalan yang lebih riil adalah korupsi yang digalang oleh sebuah sistem, dimana sistem disini sangat berpengaruh terhadap peredaran atau sirkulasi dari pergerakan korupsi tersebut. Dimana sistem disini sangat berpengaruh terhadap peredaran atau sirkulasi dari pergerakan korupsi tersebut. Dengan kata lain sistem disini di jadikan sebuah kekuatan atau legitimasi atas peredaran korupsi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia menurut Himpunan Mahasiswa Islam MPO sudah terjadi secara sistemik, dimana ada sebuah aturan sistem, baik peraturan perundangan kemudian mekanisme sistem yang bekerja baik itu sistem pemerintahan Indonesia, sistem perusahaan, sistem BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sebagainya yang memudahkan aktor, pelaku untuk melakukan proses penyalahgunaan,

³⁷ Wawancara dengan Puji Hartoyo Abu Bakar, ketua cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009, 18 November 2008

penyelewengan terhadap kekuasaan maupun finansial dalam hal ini adalah uang.

Tapi Himpunan Mahasiswa Islam MPO mencoba memperluas pengertian korupsi baik korupsi politik maupun korupsi sosial. Korupsi politik dalam artian mereka menggunakan kekuasaan untuk memanipulasi data dari masyarakat, penyebab korupsi politik karena tidak adanya kontrol yang efektif terhadap para pemegang kekuasaan. Secara umum korupsi politik diartikan sebagai *abuse of public office for private gain*.³⁸ Korupsi sosial itu bisa kita lihat bagaimana masyarakat Indonesia tidak mampu untuk mengkritisi, menganalisa efek dari proses politik yang berkembang di Indonesia pada saat ini dan bagaimana relasi perubahan dari Orde Baru ke orde reformasi. Kalau Orde Baru dijaikan melalui korupsi state atau negara dan aparaturnya, sedangkan pada level orde reformasi terjadi perselingkuhan antara para pembisnis dengan kuasa politik.

Saat ini dapat kita amati dimana pemerintah banyak secara aktor dan sebagai pelaku bisnis yang memegang kekuasaan penuh, wewenang secara otoritas untuk bisa mengatur masyarakat. Disinilah tempat terjadinya perselingkuhan kepentingan bisnis seorang yang memiliki modal dengan mereka yang memiliki otoritas politik yang secara

³⁸ Riswanda Imawan, *Birokrasi Politik dan Perilaku Korupsi*, seminar nasional AIPI XX. 2006. hal. 3

otomatis akan menjaga kepentingan bisnisnya dan memanfaatkan kedudukannya dalam posisi politik tertentu.

Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat ini makin merajarela yang terjadi secara simultan ditingkat daerah, kalau dulu zaman orde baru korupsi terjadi ditingkat pusat, pasca terjadinya otonomi daerah itu korupsi malah terjadi ditingkat daerah. Hal itu disebabkan daerah mempunyai wewenang yang besar dan secara anggaran tiap daerah punya anggaran dana yang besar, itu adalah potensi besar untuk terjadinya tindakan korupsi. Bahkan bila dilihat dari segi penanganan kasus korupsi yang ada, masih jauh dari apa yang diharapkan. Dimana korupsi sudah sangat luar biasa terjadi namun penanganannya masih sangat lambat, bahkan untuk praktek penanganan korupsi hanya dilakukan ditingkat pusat, padahal di daerah sudah sangat luar biasa sekali praktek korupsi.

Bahkan bisa dilihat pada beberapa kasus korupsi yang ada dilihat secara persentase besarnya nominal beberapa lebih tinggi didaerah, artinya bila KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hanya terfokus dipusat secara strategis juga tidak bisa karena didaerah pun secara nominal aset yang dikorupsi lebih besar. Wewenang yang dimiliki KPK terbatas karena hanya berada dipusat sedangkan didaerah tidak memiliki KPK, yang ada hanya BPK dan kewenangannya tidak sampai pada

penyelidikan. Bila pemerintah ingin memberantas korupsi disemua lini baik yang di pusat maupun di tingkat daerah ini harus ada KPK Daerah.

Salah satu anggota tim KPK mengatakan bahwa perlu adanya pembentukan KPK daerah agar kerja-kerja pelaku penindak atas tindakan korupsi bisa lebih maksimal, karena sejauh ini kinerja kepolisian dan jaksa tidak begitu bisa dilihat hasilnya secara signifikan sehingga perlu ada komisi seperti KPK ini, boleh dikatakan nanti KPK daerah yang itu lebih bisa maksimal lagi untuk menangani korupsi.³⁹

Menurut Himpunan Mahasiswa Islam MPO kinerja KPK masih sedikit terkesan tebang pilih, tebang pilih KPK ini yang agak terkesan terhadap orang-orang cendana yang sampai saat ini tidak tersentuh bahkan kasus penyelidikannya tidak pernah berlangsung. Misalkan seperti kasus Supersemar, Yayasan Pancasila, Tapos, tidak pernah dituntaskan sampai saat ini. Bahkan untuk kasus BLBI yang kemarin itu penyelidikannya sempat terhenti, jadi beberapa pihak yang terlibat disitu tidak semuanya bisa di ungkapkan. Hal ini yang kami anggap kinerja KPK masih kurang maksimal.

Penolakan dan perlawanan terhadap korupsi ini dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO dengan alasan yaitu pertama, karena korupsi itu bisa membuat proses kemiskinan di masyarakat dan korupsi juga akan melemahkan perekonomian negara serta menghambat perkembangan negara. Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga asing tentang efek dari korupsi. Menurut penelitian ini

³⁹ Wawancara dengan Puji Hartoyo Abu Bakar, ketua cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009, 18 November 2008

disebutkan bahwa yang menjadi efek dari korupsi itu adalah membuat kesenjangan yang kaya dan miskin semakin menganga artinya korupsi hanya memungkinkan untuk kelompok tertentu, kepentingan personal, kepentingan klien politik dan sebagainya.

Dalam hal ini, Himpunan Mahasiswa Islam MPO memandang korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh Pengaruh Sosial, karena ada sebuah paradigma dimasyarakat kita, jabatan sebagai status sosial bukan sebagai sebah tanggung jawab, bahkan yang lebh gawat ketik orang melihat jabatan itu sebagai sebuah hal yang strategis untuk dimanfaatkan, ini terjadi karena pemikiran masyarakat kita masih terbawa paham matrealistis sehingga banyak orang ketika menjabat baik di tingkat daerah maupun pusat hampir semua melakukan tindakan korupsi.

Praktek korupsi merupakan dampak dari *neo liberalisme* atau neo-lib, kaitannya dengan neo-lib ialah karena neo-lib bukan sekedar sistem liberalisasi ekonomi semata-mata. Tapi sudah menjelma pada wilayah kultur, kultur neo-lib ini membangung kultur materialisme dimana orang menganggap sesuatu berdasarkan materi, misalkan kita melakukan sesuatu pasti orang mempertimbangkan dengan sebuah reward atau nilai-nilai nominal, bahkan tidak ada pejabat kita bila dia bekerja keras kemudian tidak mengharapkan reward yang besar.

Dalam neo-lib ada sebuah teori homonilupus, kalau dia tidak kuat atau tidak punya status dia akan tersisihkan, sehingga yang terjadi adalah dia harus kuat dan memangsa yang lainnya, praktek-prektek korupsi sangat dekat dengan teori ini, Dalam kontek pembangunan, ada sementara pengamat yang menganggap korupsi memiliki segi positif selain negatif. Adapun korupsi mempunyai pengaruh yang positif pada:⁴⁰

1. Korupsi dapat mendorong pemerintah menjunjung kegiatan-kegiatan yang dapat melancarkan pembangunan ekonomi. Kebijakan atau kebebasan yang diinginkan oleh kaum pengusaha akan membantu pembangunan, sedangkan kebijakan yang dikesampingkan mereka tujukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain.
2. Korupsi memberi dorongan langsung pada birokrasi untuk mengerahkan tenaga guna mengambil tindakan-tindakan yang diinginkan para pengusaha. Ini sangat perlu sekali karena bantuan birokrasi yang harus diminta untuk berbagai bidang misalnya surat-surat izin, kredit, pembagian jatah valuta asing agar pekerjaan dapat berlansung.

⁴⁰ H. Zainal Arifin Thoha, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3I) UMY. 2004. hal. 207.

3. Korupsi dapat membantu pembangunan ekonomi, karena ia membuka kemungkinan untuk penanaman modal yang lebih besar dari biasanya.
4. Korupsi merangkap sebagai semacam perisai dan perlindungan terhadap kerugian-kerugian besar yang mungkin timbul karena kebijakan ekonomi yang salah. Walaupun sebuah pemerintahan memang dalam kenyataannya giat melakukan segala-galanya untuk mengembangkan ekonomi, namun mungkin saja bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak sesuai untuk alat mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan.

B. Aksi Himpunan Mahasiswa Islam Mpo Dalam Mengkritisi Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Menyimak perkembangan korupsi tidak juga semakin memudar dan bahkan ada yang menyatakan belum ada perubahan yang signifikan antara dulu dengan sekarang, berbagai kalangan mengkaitkan hal ini dengan ciri-ciri korupsi yang sangat tertutup dan serba rahasia. Bentuk-bentuk penyimpangan kekuasaan seringkali masih menyembunyikan peninggalan struktur sosial tradisional. Disadari atau tidak, diakui maupun tidak, maka korupsi jelas akan mengganggu pada pencapaian sebuah program pemerintah terutama proses pembangunan. Oleh sebab

itu, upaya pencegahan bahkan upaya penghapusan menjadi sebuah keharusan agar proses kehidupan masyarakat dapat berjalan dan tercipta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai sebuah organisasi gerakan mahasiswa secara struktural, dalam melakukan penolakan dan perlawanan terhadap korupsi, Himpunan Mahasiswa Islam MPO mengikuti dan berpedoman pada manifesto gerakan yang dibangun dari tingkatan pusat. Hal itu ditunjukkan dengan melakukan beberapa langkah. Dari tahun 2004 sampai sekarang dimana Himpunan Mahasiswa Islam MPO sudah menggalang kekuatan untuk menjadi oposisi tegas terhadap pemerintahan SBY-JK, dimana salah satu hal yang dikeritisi dan diangkat adalah gerakan anti korupsi.

Gerakan oposisi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk atau upaya untuk menggalang kekuatan besar yang bermuara pada terbentuknya sebuah gerakan anti korupsi yang masif dan signifikan. Langkah ini dilatar belakangi oleh pemikiran, ketika pihak pemerintah atau pemegang otoritas memiliki kekuatan besar tanpa adanya sebuah kontrol masif dan signifikan dari arus berbeda maka pemerintah yang dalam hal ini pemegang otoritas dengan mudah dan gampang untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang akan menumbuhkan atau memperbesar terjadinya budaya korupsi.⁴¹

Namun ketika ada arus lain yang menjadi oposisi yang mengawal dan mengontrol pemerintah dalam proses pengambil kebijakan maka pemerintah akan selalu berupaya untuk mengambil kebijakan yang tidak keluar dari jalur-jalur yang ada atau aturan-aturan yang berlaku.

⁴¹ Wawancara dengan Danang Trihatanto, Sekretaris Umum cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009.

Dimana pemerintah sebagai pemegang otoritas penuh terhadap pelaksanaan negara, ketika tidak dikawal besar kemungkinan kebijakan-kebijakan yang diambil dan dikeluarkan akan membesarkan terjadinya penyelewengan seperti korupsi. Karena itu Himpunan Mahasiswa Islam MPO menggalang kekuatan oposisi ini dengan kekuatan yang besar dengan target dan tujuan untuk melakukan proses kontrol terhadap pemerintah agar penyelewengan seperti korupsi dapat dihindari dan diminimalisir. Selain itu hal ini dilakukan untuk menguatkan aliansi gerakan untuk dengan tegas dan cepat merespon serta mengisolasi praktik-praktik korupsi di negara ini.

Selain itu, setelah mencermati kondisi yang ada selama ini dimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organ-organ gerakan sepertinya berada pada level dasar dan berjalan kurang efektif, maka Himpunan Mahasiswa Islam MPO memandang bahwa diperlukan strategi gerakan yang baru dimana strategi gerakan yang dilakukan selama ini harus segera dilakukan perubahan. Perubahan strategi gerakan ini lebih kepada teknis pelaksanaannya. Himpunan Mahasiswa Islam MPO harus mendesak korupsi bukan lagi dengan aksi turun kejalan tapi harus mampu melakukan proses diplomasi atau lobi dan negosiasi ketiaptiap instansi yang ada dan yang terpenting adalah instansi peradilan. Sebab dengan diplomasi ini Himpunan Mahasiswa Islam MPO akan dengan mudah untuk melakukan kontrol terhadap instansi yang ada

utamanya instansi peradilan. Karena ketika fungsi kontrol ini dapat dijalankan maka kemungkinan-kemungkinan untuk meluasnya atau membesarnya tindakan dan masalah korupsi ini dapat diminimalisir dan dikurangi serta diatasi dengan cepat. Hal ini dikarenakan ketika instansi itu melakukan tindakan-tindakan yang dapat membesarkan praktik korupsi maka ia akan terdeteksi dan mendapatkan masalah besar karena akan diproses secara hukum sehingga instansi itu maupun person-person yang ada didalamnya akan berpikir panjang untuk melakukan itu.

Disinilah letak utama cermin dari penindakan kasus korupsi. Ketika instansi peradilan lemah maka budaya dan praktik-praktik korupsi akan semakin menjamur dan menjadi besar sebab intitusi peradilan lemah dalam menindak hal ini tetapi ketika institusi peradilan kuat dan dapat memberantas korupsi maka budaya dan tindakan-tindakan korupsi akan berkurang sebab person atau pihak-pihak yang memiliki kesempatan besar untuk melakukan tindakan korupsi akan berpikir panjang untuk melakukan tindakan tersebut.

Akan sangat mengherankan seandainya korupsi ingin diberantas tapi institusi peradilan tidak lepas dari praktek korupsi. Disinilah letaknya mengapa proses komunikasi dan lobi serta negosiasi itu diperlukan agar Himpunan Mahasiswa Islam MPO dapat melakukan kontrol terhadap institusi peradilan. Sebab dengan kontrol ini maka institusi peradilan akan takut untuk melakukan tindak korupsi

didalamnya. Sebab dengan adanya tindak korupsi didalam institusi peradilan seperti suap dan sebagainya maka korupsi akan semakin berkembang biak dan bertambah besar dan hal ini sangat berbahaya bagi negara. Kenapa dikatakan berbahaya sebab ketika lembaga peradilan telah terlibat kedalam jaringan korupsi maka korupsi akan menjadi suatu budaya yang tersistem dan sulit untuk diatasi atau diberantas sebab lembaga yang bertugas memberantas ini telah masuk ke dalam jaringan korupsi.

Namun ketika fungsi kontrol ini berjalan maka institusi peradilan sulit untuk melakukan korupsi dan penegakan korupsi pun akan berjalan dengan lancar dan korupsi secara otomatis akan berkurang. Perlu kita ingat dan pahami bahwa Institusi yang memiliki wewenang untuk bisa membersihkan budaya korupsi dan praktek korupsi yang sistemik di Indonesia tidak bisa lepas, tidak bisa lari dari lingkaran korupsi itu sendiri. Karena itulah diperlukan sebuah kontrol yang masif terhadap lembaga atau institusi peradilan ini, agar tidak masuk ke dalam jaringan korupsi. Yang menjadi poin penting dan langkah besar yang harus segera dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah mendesak lembaga peradilan untuk bisa membersihkan diri mereka dari praktik-praktik dan tindakan-tindakan yang dapat membesarkan dan menguatkan budaya korupsi itu sendiri seperti kasus suap dan sebagainya.

Ketika ada suap di lembaga peradilan maka penindakan kasus korupsi akan lemah dan hasilnya tentunya akan sangat menguntungkan para pelaku korupsi dan akan berdampak pada semakin meluasnya dan menguatnya budaya korupsi. Dengan kata lain jaringan-jaringan atau sistem-sistem korupsi yang melibatkan lembaga atau institusi peradilan harus segera dipotong dan di hentikan dengan melakukan mekanisme kontrol dan penguasaan yang ketat terhadap lembaga peradilan. Sebab dengan kondisi seperti ini, untuk melakukan penegakan dan pemberantasan korupsi melalui gerakan anti korupsi yang diperakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO dan beberapa organ gerakan lainnya akan mengalami jalan buntu dan kesulitan yang luar biasa. Namun ketika ini dapat diputus atau dipotong, dimana lembaga peradilan steril dari jaringan korupsi maka penegakan dan pemberantasan korupsi akan mudah dan mengalami titik terang. Dan gerakan anti korupsi-pun dapat berjalan dengan lurus dan mantap untuk membersihkan secara masif korupsi-korupsi yang ada di negara ini.

Menurut Himpunan Mahasiswa Islam MPO Pembersihan lembaga peradilan dari tindakan korupsi ini dapat dilakukan dengan melakukan aliansi-aliansi yang ditujukan untuk dapat memberikan kontrol dan tekanan kepada lembaga peradilan agar tetap tegas dan kokoh dalam memberantas korupsi. Langkah ini merupakan langkah yang sering dibangun atau dijalankan Himpunan Mahasiswa Islam MPO baik di

dengan praktek korupsi yang ada. selanjutnya melalui tulisan, mengirimkan artikel-artikel, atau melakukan seminar-seminar, melalui diskusi-diskusi yang panjang.

- b. Pada level ini belum dijalankan secara maksimal oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO, walaupun Himpunan Mahasiswa Islam MPO sudah melakukan konsolidasi yaitu pada level Praktek. Himpunan Mahasiswa Islam MPO mengatakan pada level ini disebut social transpormation (transpormasi sosial). Transpormasi sosial tidal lagi menyebarkan atau mendesporakan ide-ide, tapi harus ada penggalangan kekuatan riil, perluasan gerakan, masifikasi bagaimana masyarakat itu mampu membentuk dirinya atau mengorganisir dirinya sehingga mereka sadar bahwa anti korupsi itu adalah persoalan bangsa dan merugikan mereka. Yang bisa dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah penggalangan konsolidasi gerakan, mampu untuk bisa terjun dalam masyarakat bersama-sama berpartisipasi bersama masyarakat.

Transformasi sosial belum bisa dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO karena beberapa faktor yaitu:

1. Keadaan Struktural.

Keadaan Struktural maksudnya yaitu adanya struktur-struktur didalam gerakan sosial yang masih melibatkan praktek oligarki korupsi (pemusatan praktek korupsi pada golongan elitpolitik dan kroninya) misalnya pada massa orde baru korupsi menjelma menjadi korupsi struktural dan Soeharto memberikan pejuang korupsi kepada orang terdekatnya. Dari faktor kendala struktural dan oligarki Gerakan Mahasiswa belum mampu menembus struktur ini sehingga akan sulit untuk mendorong pencegahan korupsi di tingkatan oligarki struktural.

2. Faktor aktor atau pelaku politik gerakan sosial.

Pelaku gerakan sosial tidak memiliki kemampuan dalam menguak praktek korupsi di tingkatan elit. Ketidak mampuan gerakan sosial itu disebabkan antara lain adalah:

- a. Aktor jaringan dengan stakeholder terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan data korupsi yang palid.
- b. Analisa pelik gerakan sosial terhadap praktek korupsi yang masih bersifat normatif. pembacaan praktek korupsi hanya sebatas pada pengambilan uang rakyatdalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan padahal praktek korupsi bisa juga atau bermetamorfosa menjadi bentuk-bentuk yang

canggih misalnya penggelapan uang, korupsi dalam dunia maya (lewat internet) dan lain sebagainya.

- c. Belum adanya aturan main yang tegas dalam menindak pelaku korupsi. Misalnya Undang-Undang korupsi hanya bersifat tebang pilih, tidak menyentuh kepada akar korupsi yang besar.

Dari uraian-uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam mengkritisi kebijakan pemberantasan korupsi Himpunan Mahasiswa Islam MPO melakukannya melalui beberapa langkah. Namun secara spesifik Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam mengkritisi kebijakan pemberantasan korupsi itu melalui beberapa cara dan bentuk riil yang tertuang dalam garis kebijakan Himpunan Mahasiswa Islam MPO. Adapun garis kebijakan yang diambil oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam merespon isue pemberantasan korupsi dengan cara:

1. Aksi Massa

Aksi Massa adalah mobilisasi massa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah kesatuan tujuan dengan maksud untuk memperjuangkan atau menyuarakan sesuatu hal. Dalam wilayah aksi massa ini Himpunan Mahasiswa Islam MPO melakukannya untuk dapat menyuarakan dan menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang bersumber dari ketimpangan-ketimpangan yang ada. Dalam prosesnya aksi massa

ini diawali oleh penyadaran intern yang dilakukan melalui analisis sosial untuk mencermati permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat saat ini.

Analisis sosial ini di dasarkan pada realitas sosial yang terjadi di masyarakat dimana didalamnya terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang menderita atau tertindas oleh sebuah kepentingan-kepentingan yang tersistem. Dalam analisis sosial ini, internal Himpunan Mahasiswa Islam MPO yaitu kader-kadernya diberi sebuah pemahaman tentang realitas sosial yang ada kemudian di berikan gambaran-gambaran untuk menemukan akar permasalahan sebenarnya dari ketimpangan-ketimpangan yang ada. Tujuan dari analisis sosial ini adalah untuk memperkuat kepedulian kader terhadap realitas sosial agar nantinya ketika turun ke barisan massa kader Himpunan Mahasiswa Islam MPO sudah paham mengapa mereka melakukan aksi ini. Selain itu hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang dalam kepada semua kader terhadap persoalan-persoalan bangsa saat ini yang merupakan permasalahan sosial yang timbul karena adanya praktik-praktik tidak sehat di tingkatan negara. Dan hal ini merupakan hal yang harus dikritisi dan diperjuangkan oleh semua generasi muda termasuk di dalamnya kader Himpunan Mahasiswa Islam MPO.

Setelah dilakukan analisis sosial kemudian masuk ke wilayah mapping atau pemetaan issue yang akan diusung pada aksi massa yang akan dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO. Pemetaan isu ini bersumber atau didasari dari analisis sosial yang dilakukan sebelumnya, maka dari sinilah atau dari analisis sosial inilah diambil atau dirumuskan issue-issue yang akan diusung dalam aksi yang akan dilakukan. Dalam pemetaan isu ini Himpunan Mahasiswa Islam MPO tidak akan pernah lepas dari landasan kritis yang dimiliki dimana dalam merespon dan memetakan issue ini dilakukan dengan mengedepankan aspek kritis yang bersumber dari kritisi sosial yang ada dalam analisis sosial terhadap realitas sosial yang ada. Dengan demikian maka issue-issue yang diangkat dan dilambungkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam aksi yang dilaksanakan merupakan issue-issue mendasar yang telah di bahas secara mendalam dalam analisis sosial.

Setelah itu kemudian barulah perumusan tentang target aksi, yang dilakukan dalam take lap. Dalam setiap aksi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO ditargetkan adalah aksi damai yang tujuannya untuk menguatkan dan melemparkan isu-isu central ke publik tentang kondisi riil atau sosial yang ada. Selain itu aksi massa ini ditargetkan untuk pembentukan opini di masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang sedang di hadapi bangsa

ini dengan maksud untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti tentang permasalahan yang ada saat ini.

Dengan maksud setelah masyarakat sadar maka masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini. Pembentukan opini dalam aksi massa ini biasanya ditargetkan melalui dua hal yaitu ekspose media dan pengamatan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian secara garis besar bahwa aksi massa ini bertujuan untuk dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini melalui pembentukan opini publik yang didalamnya memuat tentang ide-ide baru untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap bangsa ini. Secara target aksi massa ini memiliki efek atau pengaruh langsung untuk proses penyadaran terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam MPO dan masyarakat perkotaan. Sedangkan masyarakat pedesaan kecil kemungkinan untuk masuk atau tersadarkan melalui metode ini.

Terkait dengan permasalahan korupsi, dalam setiap aksi massa yang dijalankan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO cabang Yogyakarta mengangkat permasalahan ini sebagai issue utama maupun issue turunan. Dari periode kepemimpinan SBY-JK hingga saat ini issue korupsi tetap diangkat oleh Himpunan Mahasiswa

Islam MPO. Hal ini di karenakan Himpunan Mahasiswa Islam MPO melihat bahwa korupsi merupakan masalah penting dan serius yang harus segera diselesaikan dan untuk menyelesaikan permasalahan ini butuh perjuangan keras dan waktu panjang dan lama sebab hal ini telah menjadi penyakit yang akut dan membudaya di bangsa ini. Karena itu Himpunan Mahasiswa Islam MPO selalu mengangkat korupsi dalam setiap aksinya dengan harapan melalui hal ini permasalahan korupsi dapat diatasi dengan cepat dan seriuas oleh semua pihak.

Selain itu hal ini dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam MPO agar semua pihak dapat memperhatikan dan menyadari bahwa korupsi ini adalah masalah yang akut yang perlu segera diselesaikan dan disembuhkan agar efek yang ditimbulkan tidak terlalu parah bagi bangsa ini. Pada periode 2005 dari 3 kali aksi memuat tentang korupsi. Periode 2006 dari 2 kali aksi memuat tentang mafia peradilan dan korupsi. Periode 2007 dari 3 kali aksi semuanya memuat tentang korupsi, puntuk lebih jelasnya lihat tabel 3.1.

Dengan kata lain dalam setiap aksi massa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam MPO selalu konsisten mengangkat isue korupsi dalam setiap aksinya. Dan mengenai pembentukan opini di masyarakat luas melalui media Himpunan Mahasiswa

Islam MPO tergolong sukses mengekspose issue-isue yang mereka angkat di aksi ke dalam media baik cetak maupun elektronik sebab hampir semua aksi massa yang di lakukan Himpunan Mahasiswa Islam MPO diliput oleh media baik cetak maupun elektronik.

Tabel 3.1.

Kegiatan Aksi Massa

no	Tahun aksi	Frekwensi	Keterangan	Isue	massa
1	2005	3 kali	Jumlah pesertanya @ ± 100 peserta Rute tugu jogja-gedung agung-kantor post besar	2 kali isue sentral dan 1 kali isue turunan "selamatkan Indonesia" berantas korupsi	2 kali aksi tunggal, 1 kali aliansi gerakan gabungan dengan LMND, PMII, GMNI
2	2006	2 kali	Jumlah pesertanya @ ± 120 peserta Gedung pengadilan tinggi Yogyakarta	1 kali isue sentral dan 1 kali isue turunan: Pemberantasan Mafia peradilan dan korupsi	2 kali aksi tunggal
3	2007	3 kali	Jumlah pesertanya @ ± 125 peserta Rute tugu jogja - gedung agung - kantor post besar	2 kali isue sentral dan 1 kali isue turunan: 'anti korupsi'	2 kali aksi tunggal dan 1 kali aksi gabungan dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII

Sumber: Wawancara dengan Puji Hartoyo Abu Bakar, ketua cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009, 18 November 2008.

2. Opini Publik Melalui Seminar

Pembentukan opini publik juga dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam MPO melalui seminar-seminar yang didalamnya mengangkat tema-tema tentang korupsi atau mengarah pada pembahasan korupsi. Selain dengan tema-tema yang terkait atau berhubungan dengan korupsi dalam seminar-seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO selalu dimunculkan pembicara-pembicara yang selalu mengkritisi permasalahan-permasalahan bangsa ini termasuk salah satu diantaranya korupsi. Dalam seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO juga tidak pernah lepas dari nuansa untuk membongkar dan mengorek data-data yang dimiliki oleh para pembicara terkait dengan permasalahan-permasalahan bangsa ini salah satu diantaranya korupsi.

Dalam seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO terdapat beberapa maksud diantaranya memberikan penyadaran kepada publik terhadap permasalahan-permasalahan bangsa ini utamanya tentang korupsi yang menjadi permasalahan atau penyakit akut di bangsa ini. Selain sebagai bentuk penyadaran seminar ini juga sebagai tempat untuk penggalian dan penanaman ide-ide dan gagasan baru tentang perkembangan-perkembangan dan fenomena-fenomena yang ada saat ini. Selain itu seminar ini

juga diarahkan untuk tempat kita belajar dan menyerap ilmu untuk membuat dan merumuskan ide-ide dan gagasan baru tentang permasalahan-permasalahan yang ada saat ini agar dapat diatasi dan ditanggulangi dengan segera. Dengan kata lain Himpunan Mahasiswa Islam MPO berharapan semua peserta seminar dapat mengeksplorasi sedalam-dalamnya pemikiran-pemikiran yang dimiliki. Selain itu seminar ini merupakan tempat pertukaran ide dan informasi bagi semua peserta seminar dan disini juga merupakan tempat penggalian data-data yang nantinya dapat menjadi landasan dan acuan kita untuk merumuskan pemikiran-pemikiran dan gagasan baru.

Target dari pelaksanaan seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah untuk pembentukan opini publik sebagai sebuah bentuk penyadaran kepada publik dan untuk melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak relevan dengan kondisi yang ada. Selain itu dalam seminar ini juga tidak jarang muncul ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru yang fresh tentang permasalahan yang ada saat ini.

Untuk sasaran dari seminar ini adalah kaum-kaum intelektual dan masyarakat perkotaan. Dengan kata lain seminar-seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO ini diarahkan untuk melakukan penyadaran dan pembentukan opini kepada

masyarakat yang ada di lingkup perkotaan. Dan hal ini sangatlah terbatas hanya kepada masyarakat yang berada di lingkup perkotaan, untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Kegiatan Seminar

no	Tahun seminar	Frekwensi	Keterangan	Tema	massa
1	2005	2 kali	Jumlah pesertanya @ ± 120 peserta	<ul style="list-style-type: none"> - Supremasi hukum dan pemberantasan korupsi - Reformasi hukum menuju penegakan korupsi 	Mahasiswa dan umum
2	2006	1 kali	Jumlah pesertanya @ ± 100 peserta	<ul style="list-style-type: none"> - Korupsi dalam bingkai ekonomi politik - Korupsi kebudayaan atau kebutuhan 	Mahasiswa dan umum
3	2007	2 kali	Jumlah pesertanya @ ± 112 peserta	<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan mahasiswa dan pemberantasan korupsi - Gerakan anti korupsi 	Mahasiswa dan umum

Sumber: Wawancara dengan Puji Hartoyo Abu Bakar, ketua cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009, 18 November 2008

3. Diskusi

Diskusi disini dilakukan untuk dapat membedah secara lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam membedah permasalahan sosial atau fenomena sosial yang ada dilakukan dengan menganalisa hal itu dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Dengan maksud agar ditemukan sebuah pandangan atau perspektif yang tepat untuk hal itu. Jadi didalam diskusi ini Himpunan Mahasiswa Islam MPO menganalisis permasalahan itu melalui berbagai perspektif untuk dapat memperoleh pemahaman yang tepat tentang permasalahan itu. Selain itu dalam membedah hal ini Himpunan Mahasiswa Islam MPO selalu mengedepankan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh para kader-kadernya yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Kemudian setelah ada proses dialektika untuk membahas permasalahan sosial yang ada kemudian ada sebuah fram dan perspektif berpikir yang didapat yang merupakan mainstream bersama bagi Himpunan Mahasiswa Islam MPO untuk memandang permasalahan itu namun itu tidak selalu terikat sebaai sebuah doktrin tetapi itu merupakan mainstram berpikir yang dihasilkan melalui proses dialektika dan berpikir yang terangkum didalam diskusi. Satu catatan penting bahwa hasil diskusi tersebut tidak mentah-mentah diterima sebagai sebuah doktrin tetapi itu merupakan cara pandang yang dihasilkan melalui

dialektika bersama dan merupakan pemikiran bersama dari seluruh peserta diskusi.

Diskusi ini memiliki tujuan selain untuk memperoleh sebuah gambaran pandangan tentang sesuatu yang nantinya dapat menjadi sebuah mainstram bagi semua kader Himpunan Mahasiswa Islam MPO diskusi ini juga merupakan wahana atau tempat penyadaran bagi semua kader tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu forum diskusi yang sering digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO di beberapa tempat ini juga tidak jarang menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran dan ide-ide serta gagasan-gagasan baru yang merupakan konter opini terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak relevan dan tidak berpihak pada kepentingan dan keberlangsungan hidup dari rakyat indonesia.

Diskusi-diskusi yang biasanya dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO mengangkat tema-tema tentang permasalahan sosial yang ada seperti korupsi dan sebagainya. Dalam kurun waktu 3 tahun tema-tema yang sering diangkat dalam diskusi adalah tentang korupsi. Dan hal ini dianalisis atau dicermati dan dibahas dari berbagai perspektif tentunya hal ini di tujukan agar pemahaman kita tentang permasalahan ini tidaklah terlingkup didalam satu ruang lingkup yang sempit.

Hal ini juga di maksudkan untuk memperluas pemahaman kita tentang permasalahan ini. Untuk diskusi ini Himpunan Mahasiswa Islam MPO mengadakannya dengan dua sasaran yaitu untuk kader sendiri dengan diskusi intern yang dilakukan di basis-basis komisariat setiap minggu sekali dan diskusi lintas organ dengan target seluruh organ gerakan mahasiswa maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada. Diskusi ini diadakan dengan waktu yang tidak diatur atau kondisional dengan melakukan pembahasan-pembahasan bersama terhadap situasi nasional yang ada terutama menyangkut permasalahan-permasalahan sosial seperti korupsi. Dan tidak jarang dari forum diskusi lintas organ ini juga muncul ide-ide segar serta di wujudkan dalam satu bentuk nyata seperti aksi dan sebagainya, untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Kegiatan Diskusi

no	Tahun diskusi	Frekwensi	Keterangan	Tema	massa
1	2006	1 kali	Jumlah pesertanya @ ± 110 peserta Diskusi dan kerja sama dengan koalisi anti utang (KUA) Jakarta	- tentang utang luar negeri dan korupsi dari utang tersebut	Mahasiswa dan umum
2	2007	2 kali	Jumlah pesertanya @ ± 170 peserta Melalui lembaga mahasiswa fakultas hokum UII bekerja sama dengan KPK	- Diskusi dan sosialisasi buku saku KPK "say no corruption with love" - anti korupsi	Mahasiswa, umum
3	2009	1 kali	Jumlah pesertanya @ ± 200 peserta Diskusi terbatas dengan beberapa elemen bersama transparency International (TI) Indonesia. Di plaza hotel jogja.	- tentang tingkat korupsi di daerah	Mahasiswa dan umum

Sumber: Wawancara dengan Puji Hartoyo Abu Bakar, ketua cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009, 5 Februari 2009

4. Tulisan-tulisan di Media

Dalam melakukan proses pembentukan opini publik sebagai sebuah bentuk penyadaran kepada publik Himpunan Mahasiswa Islam MPO juga melakukannya melalui tulisan-tulisan di media nasional dan lokal. Hal ini dilakukan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat dan untuk konter opini agar masyarakat paham tentang permasalahan yang sebenarnya. Selain itu tulisan-tulisan di media ini merupakan rumusan ide-ide dan gagasan yang dimiliki oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO tentang permasalahan yang ada.

Untuk di harian nasional dan lokal tulisan-tulisan dari kader Himpunan Mahasiswa Islam MPO telah banyak yang dimuat. Untuk Himpunan Mahasiswa Islam MPO cabang Yogyakarta ada sekitar 18 tulisan yang dimuat di harian lokal dan 5 tulisan di harian nasional serta 6 tulisan di majalah. Hampir semua tulisan kader Himpunan Mahasiswa Islam MPO yang dimuat di media itu menyingung permasalahan korupsi. Target dari tulisan ini di media ini adalah masyarakat luas. Dengan tujuan agar masyarakat paham dan mengerti tentang permasalahan yang ada, untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Kegiatan Penulisan di Media

No	Tahun Penulisan di Media	Frekwensi	Keterangan	isue
1	2006	3 kali	Kedaulatan Rakyat, Kompas, Jawa Post	Tentang neo-lib, mafia peradilan dan korupsi
2	2007	5 kali	Kedaulatan Rakyat, Kompas, Jawa Post	Tentang neo-lib, mafia peradilan dan korupsi
3	2008	6 kali	Kedaulatan Rakyat, Kompas, Jawa Post	Tentang neo-lib, mafia peradilan dan korupsi

Sumber: Wawancara dengan Puji Hartoyo Abu Bakar, ketua cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009, 18 November 2008

5. Penysadaran Kepada Publik

Penysadaran kepada publik ini dilakukan melalui dua hal yaitu melalui rekayasa sosial dan turun langsung ke masyarakat menengah kebawah. Untuk rekayasa sosial sendiri dilakukan melalui langkah-langkah yang telah di tulis diatas dan ruang lingkupnya terbatas hanya kepada kaum intelektual, masyarakat perkotaan dan masyarakat menengah keatas. Tetapi untuk masyarakat menengah kebawah belum terjangkau. Karena itu diperlukan program turun langsung ke masyarakat menengah kebawah untuk melakukan penysadaran ini. Namun hal ini belum dapat dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO samapi saat ini. Hal inilah yang belum mampu untuk dilakukan oleh

Himpunan Mahasiswa Islam MPO walaupun hal ini telah terprogram didalam Himpunan Mahasiswa Islam MPO. Hal ini dikarenakan belum ada format yang baku untuk dapat melakukan hal ini. Karena itu saat ini kebutuhan mendesak bagi Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah mencari format baku untuk hal ini agar gerakan Himpunan Mahasiswa Islam MPO bukan hanya gerakan elitis untuk kalangan menengah keatas dan kaum intelektual tetapi diarahkan untuk menjadi gerakan yang dapat menjangkau semua kalangan dan lapisan masyarakat. Penyadaran kepada publik ini dilakukan agar publik sadar dan paham tentang permasalahan yang ada.

Dari langkah-langkah yang ditawarkan Himpunan Mahasiswa Islam MPO untuk memberantas korupsi, ternyata bisa dikatakan belum bisa memenuhi targetan secara maksimal. Hal ini dikarenakan Himpunan Mahasiswa Islam MPO saat ini baru mencakup wilayah rekayasa sosial saja yang mencakup penyadaran publik pada wilayah masyarakat menengah keatas dan kaum intelektual saja dan belum bisa untuk turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penyadaran di tingkatan masyarakat kelas menengah kebawah. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam membangun sebuah gerakan mempunyai acuan. Himpunan

Mahasiswa Islam MPO mempunyai terget jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam mengkritisi kebijakan pemberantasan korupsi pada saat ini merupakan target jangka pendek.

Dalam targetan jangka pendek Himpunan Mahasiswa Islam MPO yaitu bisa tetap memonitoring kebijakan pemerintah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan cara terus memantau implimentasi dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan mewacanakan gerakan anti korupsi sebagai hal yang penting kepada masyarakat bahwa ini perlu dilakukan dengan cara pendidikan akan bahaya korupsi, dimana bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga membentuk *character building* atau watak manusia, agar mampu melawan tindak korupsi. Aspek penekanan dalam pendidikan anti korupsi bukan sekadar pengayaan wacana, melainkan juga dari pendidikan itu diharapkan muncul keberanian diri seseorang untuk menjauhi tindak korupsi. Persoalannya adalah masyarakat semakin tertutup matanya ketika mereka menyerahkan segalanya dalam artian ada suatu suatu sifat acuh tak acuh, dan sikap pasrah bahwa yang melakukan korupsi adalah pemerintah dan mereka tidak memikirkan kekuatan untuk bisa mengontrol. Himpunan Mahasiswa Islam MPO merupakan salah satu

steakholder, satu elemen yang mampu untuk menyebarkan pentingnya anti korupsi kedataran masyarakat.

Dalam jangka menengah adalah bagaimana cara masyarakat untuk mampu timbul secara kritis dan mampu mengorganisir diri mereka sendiri dalam lingkungan skup-skup kecil, dan bagaimana cara mereka mampu mengontrol praktek anti korupsi ditingkatan RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), kelurahan, desa, kecamatan, sampai kedaerahan. Karena efek dari desentralisasi dan otonomi daerah dalam praktek korupsi dan sistem korupsi itu berubah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah sistem pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat, sekarang mereka beralih ke pemerintahan daerah. Praktek korupsi sudah menjangkit di pemerintahan daerah dengan kuasa kepala daerah dan berbagai aparatur pemerintah yang mendukung sistem korupsi itu.

Jangka panjang Himpunan Mahasiswa Islam MPO mencoba untuk melakukan proses konsolidasi gerakan dalam aspek pembangunan sistem baru, tatanan baru baik tatanan hukum, tatanan politik, tatanan sosil ekonomi di Indonesia sehingga mampu menciptakan sebuah cultur baru yang akuntable, bertanggung jawab, yang bisa transparan, bisa diaudit oleh masyarakat terhadap proses keuangan, proses pelembagaan politik yang ada ditingkatan pemerintah. Himpunan Mahasiswa Islam

MPO sedang menata ini dengan berbagai macam analisa skenario untuk bisa membangun langkah-langkah untuk mencapai target agar gerakan anti korupsi dapat mencapai target secara maksimal.

Adapun indikator-indikator gerakan anti korupsi agar bisa mencapai targetannya secara maksimal yaitu Institusi peradilan mampu untuk menghilangkan korupsi dalam dirinya, sehingga institusi peradilan mampu secara tegas mengambil sebuah kebijakan hukum untuk bisa menindak tegas para pelaku korupsi yang bukan kelas teri tapi kelas kakap. Institusi peradilan hanya menjadi tawanan kekuasaan dan uang sehingga hanya mampu mempenjarakan rakyat miskin dan gagal menghukum penguasa atau terjadi semacam diskriminasi keadilan (*unequality before the law*).

Hukumpun hanya menjadi lahan bisnis yang diperjual belikan, hingga para praktisi hukum kehilangan citra dan wibawanya. Institusi peradilan belum mampu menerjemahkan teks peraturan verbal yang adil dan jujur dalam realitas dakwaan dan tuntutan (bagi jaksa), realitas penyelidikan dan penidaik (bagi poisi) dan pembelaan yang berdasarkan pada profesionalisme yang mulia (bagi advokat). Bagaimana pengusaha yang menyedot uang rakyat, uang bangsa Indonesia yang berjumlah triliunan bisa lepas, mereka bisa enjoy menikmati pergi keluar negeri. Sedangkan yang kelas

teri yang korupsinya masih jumlahnya miliaran itulah yang hanya ditangkap.

Disini terjadi proses ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini perlu dipertanyakan, ada apa didalamnya? Berbagai macam analisa seperti Josh Hadi Tcondro seorang pakar yang menekuni masalah membongkar proses korupsi di Indonesia. Dia melihat bahwa terjadi oligarki politik dalam praktek korupsi di Indonesia. Oligarki korupsi adalah yang memerintah sekarang, dimana jejeran dibalikinya atau disekitarnya yang mencoba untuk menguras uang, yang memanfaatkan penyelewengan terhadap kondisi keuangan, penyelewengan terhadap kekuasaan untuk kepentingan kelompok mereka. Contohnya dizaman Orde Baru yang melakukan korupsi adalah klan-klannya Soeharto yang dimana sekarang bisa kita lihat bagaimana Yusuf Kala dengan klan-klannya seperti Aburizal Bakri dan sebagainya mengulang sejarah. Sehingga ini yang kita tuntut dan desak dan merupakan program jangka panjang. Kalau di Cina pemberantasan korupsi dibangun dan ditata sejak lama. Yang dibutuhkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah kesabaran untuk membangun gerakan anti korupsi dan harus konsisten dengan gerakan itu sendiri sehingga targetan maksimal dapat tercapai.

Efektifitas dari program yang dijalankan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO secara subyektif internal, Himpunan Mahasiswa Islam MPO merasakan bahwa adanya proses kemajuan dari tahun ketahun terhadap perluasan anti korupsi yang dilakukan pada level gerakan baik di skenario gerakannya, sporandinya dan penguatan konsolidasi gerakan anti korupsi dengan berbagai macam elemen yang ada.⁴²

Pada efek penurunannya adalah jangan sampai Himpunan Mahasiswa Islam MPO puas diri kemudian terjebak pada peran-peran artifisial permukaannya untuk menggalang anti korupsi. Karena lawan yang dihadapi Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah oligarki korupsi yang berbentuk sistem. Himpunan Mahasiswa Islam MPO yang dirasakan sampai saat ini masih bersifat aktivisial karena gerakannya masih bersifat perluasan wacana. Disamping itu, ada langkah-langkah yang merupakan strategi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang harus dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam MPO, pemerintah dan masyarakat dengan cara memepercepat proses demokrasi dengan mengurangi sifat kekuasaan yang sentralistis. Walaupun korupsi sudah menjadi bagian kebudayaan Indonesia, namun korupsi sudah menjadi persoalan politik karena persoalan korupsi sudah meluas menjadi persoalan adanya ketidak keseimbangan hubungan antara pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat sipil.

⁴² Wawancara dengan Supriya, ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009.

C Kelemahan-kelemahan Aksi Himpunan Mahasiswa Islam MPO

Ada dua faktor kelemahan yang mempengaruhi aksi Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam mengkritisi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Belum terlalu fokus terhadap permasalahan korupsi, yang dijadikan fokus utama adalah neo-lib karena jumlah nominal yang merugikan negara jauh lebih besar ketimbang korupsi.
- b. Belum optimalnya Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam membangun sinergi gerakan dengan Himpunan Mahasiswa Islam MPO yang ada di daerah, di cabang untuk bisa disosialisasikan tentang pemberantasan anti korupsi sehingga wacana anti korupsi tidak hanya digerakkan pada level pusat saja tapi bisa menyebar keseluruh daerah supaya Himpunan Mahasiswa Islam MPO di tiap-tiap daerah mampu menjadikan gerakan anti korupsi sebagai manifesto gerakan di daerah mereka karena Himpunan Mahasiswa Islam MPO merupakan stakeholder yang mencoba untuk mendorong gerakan anti korupsi. Himpunan Mahasiswa Islam MPO perlu bekerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang memiliki visi dan problem yang sama untuk memberantas korupsi.

2. Faktor Eksternal

Adanya benturan kepentingan dari lembaga-lembaga sosial yang tidak jelas, yang mengaku yayasan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mempunyai visi pemberantasan korupsi padahal mereka melakukan korupsi didalamnya. Mereka hanya mengangkat isu anti korupsi untuk mendapatkan fanding atau dana untuk memenuhi kepentingan diri dan organisasi mereka. Sehingga komitmen anti korupsi hanya sebatas wacana, sehingga dalam konsolidasi gerakan untuk anti korupsi yang lebih luas lagi baik dengan NGO (Non Government Organization) maupun dengan gerakan rakyat ditingkatan basis, dengan partai politik, dengan berbagai macam lembaga yang fokus kepada pembersihan korupsi di peradilan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan.

Padahal tujuannya sama yaitu pemberantasan korupsi tapi dalam prosesnya ternyata konflik kepentingan justru terjadi, mengenai persoalan dana, mencari dana, persoalan mengenai identitas lembaga sehingga menyulitkan membangun tatanan gerakan yang lama dan konsisten yang sudah dibangun karena terjadinya benturan kepentingan yang menjadikan dinamika gerakan dan Himpunan Mahasiswa Islam MPO merasakan hal itu sebagai faktor eksternal.

Yang dijadikan patner strategis oleh Himpunan

Mahasiswa Islam MPO dalam gerakan sosial adalah:

1. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
 - FORUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (Yogyakarta)
 - LAPERA (Yogyakarta)
 - USC SATU NAMA (Yogyakarta)
 - BINA DESA (Jakarta)
2. Gerakan social
 - LMND (YOGYAKARTA)
 - FMN (Yogyakarta)
 - FPPI (Yogyakarta)
 - KAMMI (Yogyakarta)
 - KAMDA (Yogyakarta)
 - IMM (Yogyakarta)
3. Media Massa
 - JAWA POST
 - KEDAULATAN RAKYAT
 - KOMPAS
 - BERNAS JOGJA

Selain itu, yang menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu:

1. Kurang adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan para tokoh pemerintah serta dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk memberantas korupsi.
2. Korupsi di Indonesia sering disebut sebagai korupsi yang sistemik. Maksudnya praktek korupsi tersebut memang terjadi secara sistematis melalui pemanfaatan kelemahan dalam sistem administrasi negara beserta aturan-aturannya. Kelemahan-kelemahan tersebut bukannya diperbaiki melainkan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk membenarkan korupsi.
3. Masalah budaya. Istilah korupsi tidak dikenal di kalangan masyarakat tradisional Indonesia. Pemberian rakyat kepada penguasa yang lazim disebut sebagai upeti tidak dianggap sebagai sogok yang dilarang dalam dunia modern. Sebaliknya pemberian dari penguasa kepada anggota keluarga dekat dan kepada rakyatnya meskipun diambilkan dari harta negara tidak dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Pemberian itu malah dianggap sebagai mengayomi dan menentramkan perasaan rakyat. Dewasa ini perilaku pemberian sesuatu

itu tampaknya makin menjadi-jadi dan seolah-olah dianggap sebagai suatu kewajiban sosial.

4. Tidak cukupnya gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang berlangsung lama. Oleh karena itu sebagian besar pegawai negeri sipil terpaksa melakukan penyalahgunaan wewenang di institusinya dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.
5. Sejak reformasi bergulir tahun 1998, korupsi bukannya berkurang tetapi semakin meningkat dari segi jumlah pelaku dan jumlah uang yang dikorupsi. Apabila dimasa lampau korupsi dilakukan hanya dilingkungan eksekutif, sekarang korupsi dilakukan oleh sebagian anggota legislatif di pusat dan daerah.

D. Solusi yang ditawarkan Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam pemberantasan korupsi

Dalam mengatasi pemberantasan korupsi di Indonesia Himpunan Mahasiswa Islam MPO menginginkan adanya revolusi sistemik, dimana untuk kedepannya para birokrat bukan lagi berasal dari orang-orang lama atau orde baru. Jadi kenapa korupsi masih terjadi dan merajalela dimana-mana dikarenakan banyak para birokrat yang berasal dari sisa orde baru dimana mereka sudah terkontaminasi dengan hal-hal seperti korupsi.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Puji Haartoyo Abu Bakar, ketua cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009, 18 November 2008

Sebagus apapun sistem bila orangnya masih mempunyai niatan untuk melakukan korupsi pasti masih ada selahnya untuk melakukan korupsi, berbeda bila sistemnya bagus dan orang-orangnya bagus maka praktek korupsi bisa ditekan. Perlu adanya penciptaan institusional reform dan perlu adanya penekanan pada institusi peradilan untuk bisa melakukan proses perubahan dirinya dari lembaga yang korup menjadi tidak korup karena *power tends to corrupt* kekuasaan itu cenderung untuk korup untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Instansi peradilan harus ditekan agar tidak ada beban dalam saat mengadili, menangkap koruptor-koruptor kelas kakap dan supaya adanya kemandirian dan keberanian aparaturnya penegak hukum dalam proses pengawasan secara mandiri dan konsisten.

Upaya selanjutnya adalah menerapkan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan khususnya dibidang ekonomi. Pemulihan ekonomi berorientasi jangka pendek (pragmatis) berdasarkan apa yang menjadi keinginan dan impian sebagian masyarakat seperti kondisi kebutuhan pokok. Karena ideologi masyarakat bahwa tidaklah muluk-muluk tetapi hanya untuk menyelamatkan perut istri dan anak-anak mereka.⁴⁴

⁴⁴ Fashri, Fauzi 2004. *Clean Government: Antara Cita dan Realita*, Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan. 2004. Hal 38

Secara das sollen, agama-agama mempunyai kekuatan untuk membentuk budaya masyarakat yang lekat dengan dimensi sosial. Tetapi sangat disayangkan oleh sebagian umatnya yang memahami agama secara rigid dan tekstual meletakkan agama hanya sebatas sebagai kekuatan spiritual yang berdimensi sosial. Sementara doktrin-doktrin normatif yang lebih berdimensi sosial kemanusiaan seakan disembunyikan dan dalam batas tertentu diacuhkan.

Pola pikir keberagamaan yang demikian jelas perlu diperbaharui. Agama-agama harus mengubah pengaruh yang selama ini seakan membiarkan dan mengamini umatnya untuk larut dalam buatan spiritual yang bersifat ritual, sehingga lupa akan tanggungjawab sosialnya. Selama agama hanya dipelajari dalam dimensi ritual belaka, maka selama itu pula agama tidak mampu menjadi faktor determinan. Dari segi perangkat normatif, Islam cukup detail mengurai dan memberikan solusi atas berbagai kejahatan sosial seperti korupsi. Namun perangkat normatif tersebut ternyata sampai saat ini belum mampu menjadi daya dobrak atas perubahan sosial di Indonesia.

Ada beberapa langkah konkrit mendesak diambil ketika kita setuju bahwa korupsi adalah musuh bersama bagi bangsa Indonesia dan merupakan kejahatan yang tidak bisa diampuni yaitu⁴⁵:

⁴⁵ Ma'mun Murod Al-Barbasy, *Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Dalam seminar nasional AIPI XX. 2004. Hal 7-8

1. Jalinan sinergi sosial untuk memerangi korupsi harus dikembangkan secara lebih masif di tingkat nonstruktural.
2. Langkah pertama itu harus dikerangkai sistem teologi baru yang lebih aksiologis, yakni jihad melawan korupsi di seluruh jenjang dan lini kehidupan untuk memberi basis normatif yang jelas dan terarah.
3. Langkah diseminasi doktrin jihad melawan korupsi harus dikorporasikan dengan pranata strategis kelembagaan agar bisa diakses seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah. Sebab pendidikan adalah langkah efektif membangun peradaban.
4. Membangun personifikasi atau pencitraan kesyahidan baru yang relevan dengan tuntutan pemberantasan korupsi. Kalau perlu seluruh elemen masyarakat mendesak agar negara mengangkat para mujahid yang mati dalam memberantas korupsi sebagai pahlawan nasional disatu sisi, dan tidak segan-segan menerapkan capital punishment bagi para koruptor kakap disisi lain.

E. Hasil yang ingin dicapai Himpunan Mahasiswa Islam MPO setelah melakukan program-program dalam mengkritisi pemberantasan korupsi

Hasil yang ingin dicapai oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO yaitu sesuai dengan target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.⁴⁶ Jangka pendek bahwa bisa tetap memonitoring kebijakan pemerintah agar dapat berjalan dengan seharusnya dan tersebar wacana anti korupsi kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran dari masyarakat bahwa korupsi ini berbahaya yang menjadi penyakit yang akut bagi bangsa Indonesia jika ingin besar.

Dalam jangka menengahnya, pada level masyarakat mereka bisa mengorganisir diri mereka dengan Himpunan Mahasiswa Islam MPO sebagai stakeholder yang berpartisipasi dengan masyarakat agar mereka sadar dan mampu untuk melakukan tindakan yang kongkrit ditingkatan level masing-masing agar mampu melakukan gerakan kontrol yang tidak dibiayai oleh siapapun. Sedangkan jangka panjang terjadinya perubahan struktur politik, struktur ekonomi, dan struktur sosial yang ada di Indonesia dan bebas dari oligarki korupsi yang ada. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.5. Himpunan Mahasiswa Islam MPO berharap supaya kondisi kebangsaan yang mampu transparan,

⁴⁶ Wawancara dengan Puji Hartoyo Abu Bakar, ketua cabang kota Yogyakarta periode 2008-2009, 18 November 2008

bertanggungjawab dan kondisi bangsa yang mampu untuk menghilangkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin semakin mengecil.

Himpunan Mahasiswa Islam MPO merasakan praktek korupsi semakin maju dengan modus operandi praktek korupsi yang baru melalui undang-undang, peraturan-peraturan (pasal-pasal karet) yang bisa mengundang praktek korupsi baik itu ditingkatan daerah maupun ditingkatan pusat. Misalnya tidak ada ketegasan untuk memisahkan antara pelaku bisnis dengan pelaku politik. Mereka yang sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha ikut terlibat dalam dunia politik dan memegang otoritas penting. Himpunan Mahasiswa Islam MPO melihat perubahan korupsi pada level ini, sehingga oligarki korupsi terjadi pada level kepresidenan, level peradilan dan pada level legislatif.

Apa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam MPO selama ini masih sangat kecil perubahan yang dirasakan terhadap masyarakat untuk bisa membongkar praktek korupsi yang ada di Indonesia yang sudah membudaya. Himpunan Mahasiswa Islam MPO merasakan bahwa kurang dari 50% keberhasilan yang dirasakan oleh semua gerakan bukan hanya Himpunan Mahasiswa Islam MPO belum bisa mencapai perubahan yang maksimal untuk bisa membongkar praktek korupsi yang terjadi di Indonesia.

Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam MPO terhadap pemberantasan korupsi hanya bisa direspon oleh golongan menengah yang diasumsikan sebagai kaum intelektual dan kaum yang mengenyam pendidikan. Himpunan Mahasiswa Islam MPO belum mampu menyentuh atau masuk pada tingkatan masyarakat dibawah seperti di desa, tapi dalam masyarakat perkotaan Himpunan Mahasiswa Islam MPO mempunyai banyak apresiasi dari masyarakat hal ini terbukti ketika Himpunan Mahasiswa Islam MPO mengadakan pelatihan anti korupsi, diskusi-diskusi ternyata berbagai macam elemen datang menghadiri dan membuat semacam konsolidasi gerakan yang masip.

Tabel 3.5.

Hasil yang ingin dicapai Himpunan Mahasiswa Islam MPO

no	Kegiatan dalam periode/jangka waktu	hasil
1	Jangka pendek	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap memonitoring kebijakan pemerintah agar dapat berjalan seharusnya • Timbul kesadaran dari masyarakat bahwa korupsi itu berbahaya
2	Jangka menengah	<ul style="list-style-type: none"> • masyarakat mampu melakukan gerakan kontrol bagi sistem pemerintahan
3	Jangka Panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat, bangsa dan negara bebas dari oligarki korupsi • Pemerintah membuat kebijakan yang pro rakyat sehingga bisa menciptakan suasana yang tentram di masyarakat

Adapun indikator-indikator dari keberhasilan Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam mengkritisi kebijakan pemberantasan korupsi yaitu:

1. Aksi Massa

- Mampu menggalang kekuatan aliansi gerakan dengan LSM
- Masa aksi banyak dan terorganisir
- Isue yang diangkat bisa dipahami dan menjadi opini public

2. Opini Publik Melalui Seminar

- Pesertanya banyak
- Peserta memahami
- Peserta sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi

3. Diskusi

- Peserta memiliki dan dapat melakukan analisis social
- Peserta memiliki kesadaran yang kritis akan korupsi dan melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

4. Tulisan di Media

- tersosialisasikannya ide-ide tentang pemberantasan korupsi
- Terbentuknya opini publik tentang bahaya korupsi
- Dimuat oleh media melalui pembentukan opini publik

5. Penyadaran kepada public

- Masyarakat paham tentang korupsi
- tersosialisasikannya ide-ide tentang korupsi
- terbentuknya opini publik tentang korupsi
- Masyarakat mampu melakukan pencegahan korupsi ditingkatan pemerintahan yang paling rendah hingga ke pemerintahan pusat